



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

- Rapat ke :
- Tahun Sidang : 2017-2018
- Masa Persidangan : IV
- Jenis Rapat : Audiensi*
- Hari, Tanggal : Kamis, 12 April 2018
- Pukul : 10.55 WIB
- Sifat Rapat : Terbuka
- Pimpinan Rapat : M. Dimiyati Sudja, S.Sos, M.Si., Kepala Biro Persidangan I
- Sekretaris Rapat : H. Ahmad Rojali, Kasubag Rapat Set. Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Tamu Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Koordinasi/Konsultasi Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim ke Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang membidangi tentang Kesehatan mengenai Peningkatan Mutu terhadap masyarakat di bidang kesehatan.
- Hadir : 1. Kepala Biro Persidangan I, M. Dimiyati Sudja, S.Sos, M.Si.
2. Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim,
a. Ketua, Mardiansyah, SH/F-Nasdem
b. Wakil Ketua, Muhardi, ST/F-Hanura
c. Anggota, Subhan, S.Sos/F-PBB
d. Anggota, M. Candra, SH/F-PKB
e. Anggota, Misran, S.Ag./F-PKS
f. Anggota, Dadang Hartono, SH/F-PDI
g. Anggota, Ahmad Reo Kosuma/F-Demokrat
h. Anggota Fitrianzah, S.Pt./F-Gerindra
Beserta jajaran
3. Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI
a. Drs. Kuwatno, M.Si.
b. Samani Kurniawan, SKM, M.Kes.
c. Deny Fitriadi, SH, MH.
d. Latifatul Hasanah, S.Si, MPH

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Audiensi Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang membidangi tentang Kesehatan pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Kepala Biro Persidangan I, M. Dimiyati Sudja, S.Sos, M.Si.

II. CATATAN

- A. Hal-hal yang disampaikan oleh Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim, antara lain:
1. Kabupaten Muara Enim telah memiliki RS Umum Daerah dr. H.M. Rabain yang telah terakreditasi menjadi RS tipe B dan merupakan RS rujukan untuk 4 (empat) Kabupaten/kota di sekitarnya, yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam. Sementara itu, Kabupaten Muara Enim sendiri telah membangun 3 (tiga) RS Pratama untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang tersebar di wilayah kabupaten yang sangat luas. Saat ini, 3 (tiga) RS Pratama itu telah selesai terbangun secara fisik dan telah memiliki perlengkapan medis yang cukup. Saat ini RS Pratama tersebut telah memulai melayani kesehatan untuk masyarakat, namun saat ini hanya ada tenaga bidan dan perawat yang mengelola sehingga pelayanan tidak maksimal.
 2. Dibidang ketenagakerjaan, Kabupaten Muara Enim memiliki perusahaan swasta yang sangat banyak bahkan mencapai ratusan; namun kebanyakan perusahaan tersebut tidak merangkul masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Dengan alasan penguasaan ilmu dan teknologi yang tidak terpenuhi oleh tenaga lokal juga ditemukan gejala pemanfaatan tenaga asing (dari Cina) yang sebenarnya pada level pekerja kasar. Dalam hal ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim hanya bisa memohon dan menghimbau untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal, namun karena tidak memiliki kuasa yang cukup maka tidak mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan.
 3. Sesuai dengan uraian di atas, Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim dalam kesempatan audiensi, memohon bantuan Komisi IX DPR RI untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Permohonan pemenuhan kebutuhan tenaga medis khususnya tenaga dokter spesialis untuk mengisi 3 (tiga) RS Pratama yang secara fisik telah selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.
 - 2) Pengangkatan Tenaga Sukarela (TSK) menjadi tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan tenaga para medis di 3 (tiga) RS Pratama tersebut dan mencabut moratorium pengangkatan tenaga honorer dibidang kesehatan.
 - 3) Bagaimana perusahaan di Kabupaten Muara Enim dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal dan ditemukan adanya tenaga kerja asing yang mengisi pekerjaan kasar, sehingga tenaga kerja dari lingkungan masyarakat sekitar tidak terakomodir atau tertampung.
- B. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI memberikan masukan:
1. Untuk memenuhi permintaan tenaga medis khususnya tenaga dokter spesialis, disarankan :
 - 1) Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri kesehatan melalui Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terkait program Nusantara Sehat dan Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) untuk pemenuhan kebutuhan tenaga medis di RS Pratama kabupaten Muara Enim.
 - 2) DPRD Kabupaten Muara Enim, mengajukan surat dukungan kepada Komisi IX DPR RI, mendesak Menteri Kesehatan untuk proses percepatan permohonan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait permohonan tenaga medis melalui program Nusantara Sehat dan WKDS.
 - 3) Menyarankan agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk memanfaatkan lulusan dokter spesialis Universitas Sriwijaya (UNSRI) agar dalam WKDS ditempatkan untuk RS Pratama di Muara Enim.

2. Terkait dengan Pengangkatan Tenaga Sukarela (TSK) menjadi tenaga honorer dan pencabutan moratorium pengangkatan honorer untuk memenuhi kebutuhan tenaga para medis di RS Pratama, memberikan saran:
 - 1) Pengangkatan honorer untuk kebutuhan tenaga para medis, untuk disiasati dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - 2) Karena terkait dengan berbagai aspek dan kebijakan lain, pencabutan moratorium pengangkatan honorer akan disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI untuk didalami dan dicarikan solusi yang terbaik.
3. Untuk Ketenaga kerjaan, disarankan:
 - 1) Pemda Kabupaten Muara Enim dan DPRD, khususnya Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim untuk melakukan pendekatan sosial kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim untuk memanfaatkan dana **Community Development** (CD) atau keuntungan perusahaan yang disisihkan untuk pembangunan lingkungan dan sosial dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat sekitar agar dapat memenuhi standard klasifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan.
 - 2) Adanya temuan tenaga kerja asing (dari Cina) yang mengisi posisi pekerja kasar, di mohon untuk dapat memberikan data tertulis yang rinci dan akurat serta data tersebut dikirim ditujukan kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI agar menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Mitra Kerja terkait atau dapat juga dengan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik atau Kunjungan Kerja Masa Reses.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.50 WIB.

Jakarta, 12 April 2018
KETUA RAPAT.

Ted

M. DIMYATI SUDJA, S.Sos., M.Si.